

# ANALISIS PELUANG KERJASAMA ANTARKABUPATEN DI KAWASAN BUNTOK-TANJUNG-TANAH GROGOT (KAWASAN BUNTAGO)

Hermawan Prasetya

Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, BPPT, Jakarta

## Abstract

*Cooperation development between regencies in Buntago Area (Buntok-Tanjung-Tanah Grogot) has been signed five year ago, but there is no significance realization. The aim of this article is to analyse the opportunities of cooperation in those area by comparison analysis, network and of supply-demand analysis. The result indicated that there are some opportunities to develop economic activities mainly in agricultural sector, services and mining. The result also indicated the opportunities to use high school building and its facilities together, optimizing a port in Tanah Grogot as outlet, and labor management cooperation among the regencies.*

**Kata kunci :** Buntago, kerja sama pengembangan

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kawasan Buntok, Tanjung, dan Tanah Grogot (Buntago) merupakan daerah yang saling berbatasan di antara tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN, dijelaskan bahwa Kawasan Buntok dan Sekitarnya merupakan salah satu kawasan andalan di Provinsi Kalimantan Tengah; Tanjung sebagai Ibukota Kabupaten Tabalong adalah salah satu PKL pendukung Kawasan Andalan Kandungan dan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Selatan; dan Tanah Grogot sebagai Ibukota Kabupaten Pasir merupakan salah satu PKW pendukung Kawasan Andalan Bonsamtebajam (Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam dan sekitarnya) di Provinsi Kalimantan Timur.

Kerja sama pembangunan antardaerah merupakan upaya perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh tanah air untuk menjamin keserasian dan mempercepat laju pembangunan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Pasir memandang perlu secara bersama-sama mewujudkan keserasian dan mempercepat laju pembangunan antardaerah melalui kerja sama pembangunan daerah.

Kerja sama pembangunan ini dimulai dengan kesepakatan Kerja Sama Antarpemerintah Kabupaten pada 6 Juni 2002. Kerja sama tersebut meliputi 12 bidang, yang kesemuanya merupakan urusan-urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten, yaitu (1) Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (2) Pendidikan dan Kebudayaan (3) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Jasa (4) Perhubungan, Transportasi, dan Pariwisata (5) Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, (6) Kehutanan dan Perkebunan, (7) Lingkungan Hidup, (8) Ketertiban dan Keamanan (9) Pemuda dan Olah Raga, (10) Pertambangan, Energi, dan Sumberdaya Mineral, (11) Tata Ruang dan Pertanahan, dan (12) Kesehatan.

Hingga saat ini Kerja Sama Pengembangan Kawasan Buntago telah berlangsung hampir lima tahun, namun belum terdapat kesepakatan dan realisasi kerja sama yang berarti. Oleh karena itu, tulisan ini akan diarahkan pada upaya menganalisis peluang-peluang kerja sama antarkabupaten di Kawasan Buntago. Hasil analisis ini diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi para *stakeholder* yang terlibat dalam kerja sama pembangunan antarkabupaten bagi perumusan bentuk-bentuk kerja sama yang lebih konkret.

### 1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama di berbagai bidang pembangunan Kawasan Buntago. Sedangkan sasaran dari tulisan ini adalah :

- Melakukan deskripsi kedudukan dan profil singkat Kawasan Buntago.
- Melakukan analisis peluang kerja sama bidang ekonomi, prasarana wilayah, pemasaran, dan ketenagakerjaan.

### 1.3. Lingkup Wilayah Kajian

Wilayah kajian meliputi empat kabupaten, yakni Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Barito Timur (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Pasir (Provinsi Kalimantan Timur).

## 2. BAHAN DAN METODE

Data yang dibutuhkan dalam penulisan paper ini adalah data sekunder berupa data statistik dan data spasial Kawasan Buntago. Data tersebut dikumpulkan dari instansi terkait, baik di pusat maupun daerah.

Data yang diperoleh diolah dengan metode seleksi, pengurutan, dan reklasifikasi data. Setelah diolah, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis, yakni :

- Analisis Perbandingan (*Comparative Analysis*), yang digunakan terutama untuk menganalisis peluang kerja sama. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan Koefisien Lokasi (*Location Quotient*, LQ). Analisis perbandingan juga akan digunakan untuk menganalisis peluang kerja sama penggunaan prasarana wilayah.
- Analisis Jaringan (*Network Analysis*), yang diarahkan untuk memilih rute terpendek yang harus dilalui untuk menuju ke suatu titik dari titik tertentu. Analisis ini digunakan untuk menentukan lokasi *outlet* bersama Kawasan Buntago.
- Analisis Permintaan-Penawaran (*Supply-Demand Analysis*), yang diarahkan untuk perbandingan antara permintaan dan penawaran. Analisis ini akan digunakan untuk analisis peluang kerja sama ketenagakerjaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Profil Kawasan Buntago

Luas Kawasan Buntago mencapai 28.213 km<sup>2</sup> (lihat Gambar 1). Kawasan ini memiliki fisiografis yang hampir sama. Pada umumnya merupakan dataran hingga perbukitan/pegunungan. Hanya Kabupaten Pasir yang mempunyai daerah pesisir/pantai. Pegunungan Meratus merupakan salah satu batas dari kawasan ini yang terbentang

dari arah utara ke selatan. Daerah dataran merupakan daerah yang berawa-rawa, sedangkan daerah perbukitan merupakan hutan tropis dan semak belukar. Dengan kondisi seperti ini, maka Kawasan Buntago merupakan daerah yang rawan terhadap bahaya banjir dan kebakaran hutan.

Iklim di Kawasan Buntago termasuk kategori tropis basah dengan dua musim, yaitu musim panas (berkisar Mei-September) dan musim penghujan (berkisar Oktober-April). Curah hujan yang terjadi dalam setahun mencapai 1.300 mm hingga 3.000 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 120-160 hari.

Penggunaan lahan di Kawasan Buntago didominasi oleh hutan dan perkebunan. Jenis hutan yang ada adalah hutan lindung maupun hutan produksi (hutan produksi, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas). Luas hutan yang ada sekitar 1.833.047 ha atau 65% dari seluruh luas kawasan. Perkebunan mempunyai luas sekitar 318.447 ha (11,3%). Jenis perkebunan yang dominan di kawasan ini adalah perkebunan besar dan rakyat.

Pada tahun 2004, jumlah penduduk di kawasan ini sebesar 566.658 jiwa, dimana lebih dari 60% berada di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir. Rata-rata pertumbuhan penduduk di kawasan ini sebesar 2,6% per tahun.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Buntago pada tahun 2004 sebesar Rp5.443,5 juta. Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir memberikan kontribusi lebih dari 70%. Selanjutnya, apabila dilihat dari kontribusi per sektor, maka perekonomian Kawasan Buntago didominasi oleh sektor-sektor primer. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian dan sektor pertambangan yang memberikan kontribusi sebesar 72,28% per tahun.

Jalan utama yang menghubungkan antarpusat-pusat kegiatan ini mempunyai kelas jalan arteri primer dan jalan kolektor. Jalan arteri di Kalimantan Tengah menghubungkan batas Kalimantan Barat (sekitar 21 km dari Kudangan) – Pangkalan Bun – Sampit – Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – batas Kalimantan Selatan (14 km dari Kuala Kapuas). Sedangkan jalan kolektor 1 menghubungkan kabupaten-kabupaten di wilayah timur dengan barat yang terdiri dari ruas-ruas jalan batas Kalimantan Selatan – Pasar Panas – Tamiyang Layang – Ampah – Muara Teweh – ke utara sampai Kuala Kurun – dan ke selatan sampai kota Palangkaraya.

Moda transportasi udara dilayani oleh Bandar Udara Warukin di Kabupaten Tabalong. Pengelolaan bandara ini sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga sifat pelayanannya dapat dikembangkan untuk penerbangan reguler, tidak terbatas penerbangan

carteran saja. Jalur penerbangan reguler yang memungkinkan untuk dibuka adalah Tanjung – Banjarmasin, Tanjung – Batulicin/Kotabaru, Tanjung – Balikpapan/Samarinda, dan Tanjung – Palangkaraya/Sampit/Pangkalan Bun.

Transportasi laut di kawasan ini menggunakan dua jenis moda, yaitu Moda Transportasi Sungai dan Moda Transportasi Laut. Moda transportasi sungai lebih banyak berkembang di Kabupaten Barito Selatan yang menggunakan Sungai Barito. Sementara moda transportasi laut menggunakan pelabuhan sungai dan laut yang terletak di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir.

Ketersediaan prasarana pendidikan dasar (SD dan SLTP), kesehatan (Puskesmas dan Puskesmas Pembantu), perekonomian (pasar), serta prasara peribadatan terdapat dalam jumlah yang memadai. Sementara prasarana pendidikan menengah (SLTA) tidak semua kecamatan di kawasan ini mempunyai ketersediaan yang memadai.

### **Analisis Peluang Kerja Sama**

#### **Kerja Sama Ekonomi**

Sepanjang rentang waktu 2001-2004, kecenderungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diraih empat kabupaten di Kawasan Buntago relatif lamban, yakni rata-rata 4,67% per tahun. Pencapaian yang relatif rendah ini menjadikan tantangan yang cukup besar dalam mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.

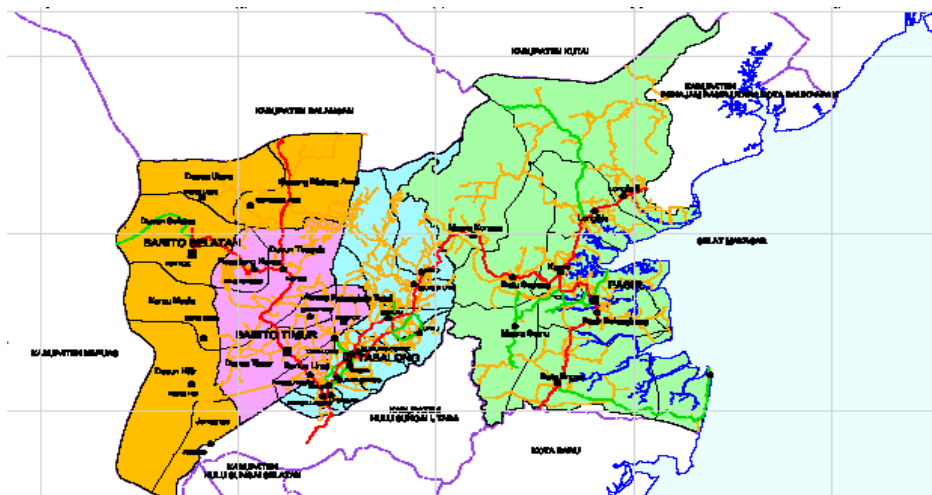
Untuk kurun waktu 2007-2016, tingkat pertumbuhan ekonomi Kawasan Buntago

diprojeksikan dalam dua skenario. Dalam skenario pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi untuk seluruh kawasan diproyeksikan hanya sebesar 4,67% per tahun, sesuai dengan kecenderungan prestasi yang dicapai selama periode 2001-2004. Dengan kapasitas fiskal yang termasuk kategori tinggi, maka dalam skenario kedua laju pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut diproyeksikan sekitar 8,17% setiap tahunnya (lihat Tabel 1).

Untuk mengetahui peluang kerja sama ekonomi antarkabupaten, dilakukan perhitungan koefisien lokasi (*location quotient*) terhadap sembilan sektor ekonomi di Kawasan Buntago. Nilai LQ menunjukkan kemampuan daerah dalam sektor yang bersangkutan dan akan memberikan indikasi sebagai berikut (Rondineli, 1985) :

- LQ > 1, menunjukkan kawasan yang bersangkutan mempunyai potensi ekspor dalam sektor tertentu.
- LQ < 1, menunjukkan kawasan yang bersangkutan mempunyai kecenderungan impor dari daerah lain dalam sektor tertentu.
- LQ = 1, menunjukkan kawasan yang bersangkutan mencukupi (swasembada) dalam sektor tertentu.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ (perhatikan Tabel 2), maka secara teoritis akan dapat diperkirakan dua bentuk kerja sama antarkabupaten, yakni (Prasetya, Hermawan dan Anur Rofiq Hadi, 2000) :



**Gambar 1.** Peta Administrasi Kawasan Buntago

**Tabel 1.** Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-kabupaten di Kawasan Buntago, 2007-2016 (%)

Kabupaten	Rata2 LPE 2001-2004	Indeks Kapasitas Fiskal 2005	Proyeksi Rata2 LPE	
			Skenario Normal	Skenario Akselerasi
Barito Selatan	1,98	Tinggi	1,98	2,97
Barito Timur	2,03	Tinggi	2,03	3,05
Tabalong	5,18	Tinggi	5,18	9,06
Pasir	5,61	Sangat Tinggi	5,61	9,81
Kawasan Buntago	4,67	Sangat Tinggi	4,67	8,17

Sumber : Hasil perhitungan dan proyeksi, 2006.

**Tabel 2.** Sektor-Sektor Ekonomi di Kawasan Buntago yang Memiliki Nilai LQ di Atas 1

Sektor/Subsektor	Nilai LQ di Atas 1				
	Barito Selatan	Barito Timur	Tabalong	Pasir	Kawasan Buntago
Pertanian		X		X	X
Pertambangan dan Penggalian			X	X	X
Industri Pengolahan					
Listrik dan Air Bersih					
Bangunan	X	X		X	X
Perdagangan, Hotel, dan Restoran					
Pengangkutan dan Komunikasi	X				
Kuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	X	X			X
Jasa-jasa	X	X		X	X

Sumber : Hasil analisis (2006).

- Bentuk kerja sama yang bersifat agregatif. Bentuk ini cocok diterapkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang sama. Bentuk kerja sama agregatif mengharuskan setiap daerah untuk bekerja sama saling memperkuat dalam menjual surplus produksinya ke luar kawasan. Konsekuensi dari bentuk kerja sama ini adalah perlunya dibangun jaringan transportasi antardaerah dan satu *outlet* untuk memasarkan kelebihan produksi atau satu industri pengolahan untuk memproses produk-produk tersebut.
- Bentuk kerja sama yang bersifat komplementer. Bentuk ini cocok dikembangkan pada daerah-daerah yang mempunyai potensi ekonomi beragam. Pada kerja sama ini, orientasi pemasaran lebih banyak ke dalam kawasan itu sendiri. Konsekuensinya adalah dibangunnya infrastruktur transportasi intrakawasan, sementara pembangunan/penetapan *oulet* yang dipakai bersama tidak terlalu diperlukan.

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa kabupaten-kabupaten di Kawasan Buntago mempunyai potensi ekonomi yang hampir seragam, yaitu pertanian, pertambangan, bangunan, dan jasa-jasa. Dengan demikian, bentuk kerja sama ekonomi yang direkomendasikan adalah kerja

sama ekonomi yang bersifat agregatif. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya bersama dalam mengembangkan komoditas pada sektor-sektor yang seragam tadi dan penetapan *outlet* bersama untuk pemasaran komoditas tersebut.

#### Kerja Sama Fasilitas Sosial

Analisis ini diarahkan untuk mengetahui posisi ketersediaan dan kebutuhan suatu jenis prasarana wilayah di setiap wilayah di Kawasan Buntago dengan cara membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan. Data ketersediaan diperoleh dari statistik, sementara besarnya kebutuhan dihitung dengan cara jumlah penduduk dibagi standar minimal pelayanan suatu prasarana. Nilai rasio antara ketersediaan dan kebutuhan dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pelayanan di suatu daerah. Nilai kurang dari 1 menunjukkan bahwa ketersediaan prasarana di suatu daerah adalah kurang, sementara nilai di atas 1 menunjukkan bahwa suatu daerah mencatat surplus dalam prasarana pelayanan.

Berdasarkan hasil perhitungan (lihat Tabel L1 pada Lampiran), dapat direkomendasikan kerja sama dalam penggunaan prasarana pelayanan antarkabupaten di Kawasan Buntago dan orientasi suatu kecamatan dalam memperoleh pelayanan. Hampir di semua kecamatan ketersediaan prasarana pendidikan dan kesehatan sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio

ketersediaan dan kebutuhan prasarana di atas 1. Pengecualian dari hal tersebut terdapat pada prasarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan rumah sakit umum. Ada enam kecamatan yang rasio ketersediaan dan kebutuhan prasarana SLTA-nya mempunyai nilai di bawah 1 dan rumah sakit umumnya hanya terletak di ibukota kabupaten. Konsekuensi dari nilai rasio seperti ini adalah bahwa keenam kecamatan tersebut harus bekerja sama atau berorientasi pada kecamatan-kecamatan terdekat yang surplus prasarana SLTA-nya. Sementara itu, hampir semua kecamatan di Kawasan Buntago dalam memperoleh pelayanan rumah sakit harus berorientasi ke ibukota kabupaten terdekat.

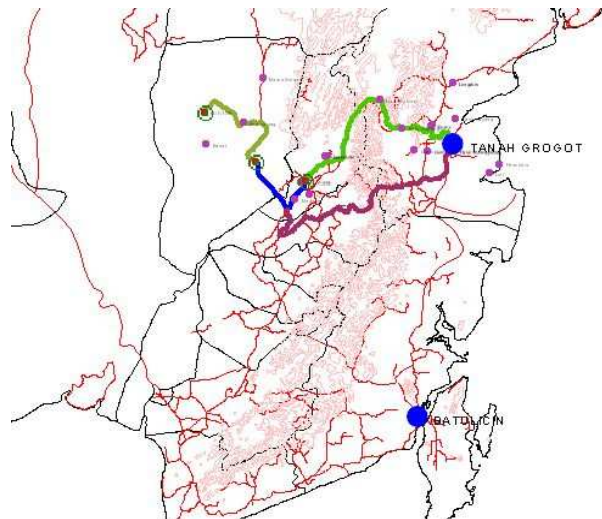
### 3.2.3. Penetapan *Outlet* Bersama

Terdapat tiga alternatif *outlet* untuk Kawasan Buntago, yaitu Pelabuhan Pundong di Tanah Grogot (Kalimantan Timur), Pelabuhan Batulicin (Kalimantan Selatan), dan Pelabuhan Sungai Pulang Pisau (Kalimantan Tengah).

Dalam rangka melakukan pemilihan alternatif *outlet* yang sesuai, maka dilakukan analisis pemilihan alternatif *outlet* tersebut. Pemilihan *outlet* dilakukan melalui analisis jaringan (*network analysis*) menggunakan program tambahan (*extension program*) yang terdapat dalam perangkat lunak sistem informasi geografis (SIG). Analisis ini dilakukan dengan opsi *Find Closest Facility*, dimana dalam analisis ini akan dihitung rute terpendek fasilitas terdekat dari sumber pergerakan. Ada tiga jenis data yang dibutuhkan, yaitu data fasilitas, jaringan jalan, dan *event* lokasi awal pergerakan menuju fasilitas yang telah didefinisikan sebelumnya (Anonymous, 1995).

Fasilitas didefinisikan sebagai tiga pelabuhan alternatif; *event* adalah ibukota kabupaten di Kawasan Buntago; dan jaringan jalan adalah jaringan jalan utama di Pulau Kalimantan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pelabuhan Pundong di Tanah Grogot merupakan pelabuhan terdekat dari seluruh ibukota kabupaten di Kawasan Buntago. Analisis ini juga menunjukkan rute jalan terpendek yang direkomendasikan untuk pergerakan penumpang dan barang dari setiap ibukota kabupaten ke Pelabuhan Pundong.

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa rute terpendek Kawasan Buntago ke pelabuhan *outlet* adalah ruas jalan Buntok – Tamiyang Layang – Tanjung – Tanah Grogot. Namun, setelah faktor kontur dimasukkan ke dalam analisis, maka rute terbaik hasil analisis adalah ruas Buntok – Tamiyang Layang – Tanah Grogot (melalui Kabupaten Balangan).



**Gambar 2.** Analisis Jaringan untuk Menentukan *Outlet* dan Jaringan Jalan

### 3.2.4. Kerja Sama Ketenagakerjaan

Analisis peluang kerja sama ketenagakerjaan dilakukan dengan melihat tenaga kerja dari sisi permintaan dan penawaran. Sisi permintaan tenaga kerja akan diperkirakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menghitung elastisitas tenaga kerja per sektor ekonomi di setiap kabupaten di Kawasan Buntago. Elastisitas tenaga kerja adalah rata-rata penyerapan tenaga per sektor ekonomi apabila terjadi perubahan pertumbuhan output sektor tersebut sebesar 1%.
- Menghitung perkiraan penyerapan tenaga kerja tahun 2008, 2012, dan 2016. Perhitungan ini dilakukan dengan perkalian elastisitas tenaga kerja, laju pertumbuhan ekonomi, dan selisih tahun perhitungan dengan tahun perencanaan.

Sementara itu, sisi penawaran dihitung dari perkiraan angkatan kerja yang telah dihitung dengan menggunakan formula bunga-berbunga (bunga majemuk) sebagai berikut (Muliakusuma : 2000) :

$$P_n = P_o (1+r)^n$$

dimana :

$P_n$  : Jumlah penduduk pada tahun ke-t

$P_o$  : Jumlah penduduk pada tahun dasar.

$r$  : Rata-rata proporsi kenaikan penduduk setiap tahun.

$n$  : Rentang tahun proyeksi (t-0).

Dengan mengasumsikan bahwa proporsi pekerja per sektor ekonomi tetap selama periode 2007-2016, maka dapat diperkirakan besarnya penawaran tenaga kerja per sektor pada tahun-tahun perencanaan.

Berdasarkan hasil analisis penawaran dan permintaan tenaga kerja, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3, dapat dilihat bahwa sebagian besar sektor ekonomi di kabupaten-kabupaten di Kawasan Buntago mengalami *oversupply* tenaga kerja pada tahun 2008. Dari tabel tersebut juga

dapat diketahui bahwa sektor-sektor jasa umumnya mengalami kekurangan tenaga kerja.

Selanjutnya, pada tahun 2016 diperkirakan hampir semua sektor ekonomi di Kabupaten Pasir mengalami kekurangan tenaga kerja, sementara di kabupaten lainnya sebagian sektor ekonominya mengalami kelebihan pasokan tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peluang untuk menggaling kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan di antara kabupaten-kabupaten di Kawasan Buntago.

**Tabel 3.** Analisis Penawaran-Permintaan Tenaga Kerja di Kawasan Buntago, Tahun 2008, 2012 dan 2016

Lapangan Usaha	2008				2012				2016			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Listrik dan Air Bersih	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+
Bangunan	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+
Pengangkutan dan Komunikasi	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+
Keuangan	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-
Jasa-jasa	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+

Catatan : 1 = Kabupaten Barito Selatan; 2 = Kabupaten Barito Timur; 3 = Kabupaten Tabalong; 4 = Kabupaten Pasir;

(+) = Kelebihan Tenaga Kerja; (-) = Kekurangan Tenaga Kerja.

Sumber : Hasil analisis, 2006.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Terdapat peluang kerja sama ekonomi antarkabupaten di Kawasan Buntago yang bersifat agregatif untuk pengembangan komoditas-komoditas sektor pertanian, pertambangan, bangunan, dan jasa-jasa.
- Pelabuhan di Tanah Grogot merupakan pelabuhan yang paling dekat untuk dikembangkan sebagai *outlet* pemasaran komoditas bersama kawasan ini.
- Peluang kerja sama pengembangan fasilitas sosial yang berpeluang dikembangkan di kawasan ini adalah fasilitas sekolah menengah atas (SLTA).
- Kerja sama ketenagakerjaan berpeluang untuk dikembangkan mulai tahun 2016 dengan Kabupaten Pasir diperkirakan sebagai daerah penyerap tenaga kerja dari kabupaten lainnya.

Kajian ini masih bersifat umum, dimana untuk operasionalisasi kesepakatan-kesepakatan kerja sama pembangunan antarkabupaten perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih rinci. Pendetailan tersebut terutama terkait dengan :

- Identifikasi komoditas-komoditas yang terdapat dalam sektor pertanian, pertambangan, bangunan, dan jasa-jasa.
- Aksesibilitas kecamatan-kecamatan yang terbatas dalam rangka kerja sama pemanfaatan fasilitas sekolah menengah atas (SLTA),
- Kajian kondisi dan kinerja infrastruktur transportasi terutama jaringan jalan dan pelabuhan di Tanah Grogot.
- Kualitas tenaga kerja dan sarana pelatihan tenaga kerja di Kawasan Buntago.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 1995. *Network Analysis Documentation Helpfile*, ESRI Inc., New Delhi, p.5.
- Muliakusuma, Sutarsih. 2000. "Proyeksi Penduduk" dalam *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.254.
- Prasetya, Hermawan dan Aunur Rofiq Hadi. 2000. "Strategi Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) di Kawasan Timur Indonesia," dalam Djarwadi, dkk. (Peny.), *Menoleh ke Timur : Pemikiran Kebijakan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia 1994-2000*, Sekretariat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, Jakarta, hlm.114.
- Rondineli, Denis A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis : The Spatial Dimensions of Development Policy*, Westview Press Inc., Colorado, p.31.